



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR 41/KPTS/M/2016  
TENTANG  
PENETAPAN NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN BESARAN TUNJANGAN  
KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai

- Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
  5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 378);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
  8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  10. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Validasi Hasil Evaluasi Jabatan Nomor B/142/M.PANRB/1/2016 Tanggal 8 Januari 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN NAMA JABATAN, KELAS JABATAN, DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.
- KESATU : Menetapkan Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada setiap kelas jabatan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini.
- KEDUA : Nama Jabatan, Kelas Jabatan, dan Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai berlaku pada bulan November 2015.
- KETIGA : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
4. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PUPR.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Februari 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
 PERUMAHAN RAKYAT  
 NOMOR 41 /KPTS/M/2016  
 TENTANG  
 PENETAPAN NAMA JABATAN, KELAS JABATAN,  
 DAN BESARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN  
 UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PENETAPAN DAFTAR NAMA JABATAN, KELAS JABATAN DAN BESARAN  
 TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
<b>I JABATAN STRUKTURAL</b>			
<b>A JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA</b>			
1	Sekretaris Jenderal	17	26,324,000
2	Direktur Jenderal		
3	Inspektur Jenderal		
4	Kepala Badan		
5	Staf Ahli Menteri PUPR	16	20,695,000
<b>B JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA</b>			
1	Sekretaris Unit Organisasi	15	14,721,000
2	Direktur		
3	Kepala Pusat		
4	Kepala Biro		
5	Inspektur		
6	Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol		
7	Sekretaris Dewan Sumber Daya Air Nasional		
8	Sekretaris Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		
9	Kepala Balai Besar	14	11,670,000
10	Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI	13	8,562,000
<b>C JABATAN ADMINISTRATOR</b>			
1	Kepala Balai Wilayah Sungai	13	8,562,000
2	Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional		
3	Kepala Balai Bendungan		
4	Kepala Sub Direktorat	13	8,562,000
5	Kepala Bagian Unit Organik		
6	Kepala Bidang Unit Organik		
7	Kepala Balai	12	7,271,000
8	Kepala Bidang Unit Pelaksana Teknis/ Balai Besar	11	5,183,000
9	Kepala Bagian Unit Pelaksana Teknis/ Balai Besar		
10	Kepala Bagian Sekretariat KORPRI		

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
<b>D JABATAN PENGAWAS</b>			
1	Kepala Seksi Unit Organik	9	3,781,000
2	Kepala Sub Bagian Unit Organik		
3	Kepala Loka		
4	Kepala Seksi Unit Pelaksana Teknis		
5	Kepala Sub Bagian Unit Pelaksana Teknis		
<b>II JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU (JFT)*</b>			
<b>A BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>			
1	Teknik Pengairan	5 - 13	
2	Teknik Jalan dan Jembatan	5 - 13	
3	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	5 - 13	
4	Teknik Penyehatan Lingkungan	5 - 13	
5	Penata Ruang	5 - 13	
6	Pembina Jasa Konstruksi	8 - 13	
<b>B BIDANG LAINNYA</b>			
7	Widyaiswara	8 - 13	
8	Auditor	6 - 13	
9	Peneliti	8 - 13	
10	Perekayasa	8 - 13	
11	Perencana	8 - 13	
12	Dokter	8 - 9	
13	Teknisi Litkayasa	5 - 8	
14	Pengendali Dampak Lingkungan	8 - 11	
15	Instruktur	6 - 11	
16	Pranata Humas	6 - 11	
17	Pustakawan	6 - 11	
18	Analisis Kepegawaian	8 - 11	
19	Perancang Peraturan Per-UU-an	8 - 11	
20	Pranata Komputer	6 - 11	
21	Surveyor Pemetaan	6 - 11	
22	Arsiparis	6 - 11	
23	Dokter Gigi	8 - 9	
24	Pranata Laboratorium Kesehatan	5 - 8	
25	Perawat Gigi	5 - 8	
26	Perawat	5 - 8	
27	Bidan	5 - 8	
28	Radiografer	5 - 8	
29	Apoteker	8 - 9	
30	Pengelola Barang dan Jasa	8 - 9	

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
<b>*KELAS JABATAN JFT</b>			
1	Pejabat Fungsional Ahli Utama	13	8,562,000
2	Pejabat Fungsional Ahli Madya	11	5,183,000
3	Pejabat Fungsional Ahli Muda	9	3,781,000
4	Pejabat Fungsional Ahli Pertama	8	3,319,000
5	Pejabat Fungsional Terampil Penyelia		
6	Pejabat Fungsional Terampil Pelaksana Lanjutan	7	2,928,000
7	Pejabat Fungsional Terampil Pelaksana	6	2,702,000
8	Pejabat Fungsional Terampil Pemula	5	2,493,000
<b>III JABATAN FUNGSIONAL UMUM</b>			
<b>A JABATAN UTAMA</b>			
1	Analisis Investasi dan Pasar Konstruksi	7	2,928,000
2	Analisis Jalan Jembatan		
3	Analisis Pembiayaan		
4	Analisis Pemetaan		
5	Analisis Penyediaan Perumahan		
6	Analisis Sistem Jaringan Jalan Jembatan		
7	Penelaah Standar dan Pedoman		
8	Penelaah Bangunan Gedung dan Permukiman		
9	Penelaah Kebijakan		
10	Penelaah Kompetensi Jasa Konstruksi		
11	Penelaah Laik Fungsi Prasarana Fisik		
12	Penelaah Leger Jalan		
13	Penelaah Manajemen Mutu		
14	Penelaah Mutu Konstruksi		
15	Penelaah Pemberdayaan Masyarakat		
16	Penelaah Pengadaan Tanah		
17	Penelaah Pengelolaan Sumber Daya Air		
18	Penelaah Pengembangan Keahlian		
19	Penelaah Penyehatan Lingkungan Permukiman		
20	Pengamat Operasi dan Pemeliharaan		
21	Penata Bangunan Gedung dan Permukiman		
22	Penata Pemberdayaan Masyarakat		
23	Penata Pengelolaan Sumber Daya Air		
24	Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman		
25	Penata Sarana Kelitbangan		
26	Pengolah Bahan Standar dan Pedoman		
27	Operator Alat Berat	5	2,493,000
28	Pengolah Pengelolaan Sumber Daya Air		

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
<b>B JABATAN PENUNJANG</b>			
29	Ajudan Menteri	7	2,928,000
30	Analisis Karir dan kompetensi		
31	Analisis Kinerja Pegawai		
32	Analisis Ortala		
33	Analisis Perencanaan		
34	Analisis Sistem Informasi Manajemen		
35	Analisis Statistik		
36	Analisis Teknik dan Materi		
37	Penelaah Advokasi Hukum		
38	Penelaah BMN		
39	Penelaah Kepegawaian		
40	Penelaah Kerjasama		
41	Penelaah Keuangan		
42	Penelaah Pelayanan Informasi Publik		
43	Penelaah Pengadaan Barang Jasa		
44	Penelaah Peraturan Perundang-undangan		
45	Penelaah Publikasi		
46	Penelaah Tata Naskah Dinas		
47	Penyusun Monev dan Pelaporan		
48	Penyusun Pelaporan Pimpinan		
49	Penyusun Program dan Rencana Anggaran		
50	Perencana Jaringan Utilitas		
51	Programmer		
52	Teknisi		
53	Juru Operasi dan Pemeliharaan	6	2,702,000
54	Penata Asesment Center		
55	Penata Asrama		
56	Penata Bahan Pustaka		
57	Penata BMN		
58	Penata Diklat		
59	Penata Kepegawaian		
60	Penata Keuangan		
61	Penata Urusan Keprotokolatan		
62	Pengolah Bahan Dokumentasi		
63	Pengolah Data dan Informasi		
64	Pengolah Monev dan Pelaporan		
65	Pengolah Program dan Rencana Anggaran		
66	Penyusun Bahan Publikasi		
67	Sekretaris		

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TUNJANGAN KINERJA (Rp.)
	68 Mekanik	5	2,493,000
	69 Pelaksana Urusan Kerumahtanggan TUP		
	70 Pengadministrasi Umum		
	71 Pengatur Sarana Kantor		
	72 Penilik Jalan		
	73 Petugas Asrama		
	74 Petugas Operasi dan Pemeliharaan		
	75 Komandan Satpam	4	2,350,000
	76 Pengemudi Menteri		
	77 Petugas Obat	3	2,216,000
	78 Caraka		
	79 Pengemudi		
	80 Satpam	1	1,968,000
	81 Pramubakti		
<b>IV</b>	<b>JABATAN LAINNYA (KESATKERAN** DAN LAINNYA)</b>		
	<b>STAF KHUSUS, TENAGA AHLI DAN STRATEGIS LAINNYA</b>		
	1 Staf Khusus Menteri	15	14,721,000
	2 Tenaga Ahli Menteri	13	8,562,000
	3 Sekretaris PMU	9	3,781,000
	<b>JABATAN KESATKERAN</b>		
	1 Kepala Satuan Kerja Mandiri	11	5,183,000
	2 Pejabat Pembuat Komitmen Mandiri	9	3,781,000
	3 Pejabat Penguji SPM	7	2,928,000
	4 Pelaksana Teknik		
	5 Bendahara		
	6 Penata Teknik	6	2,702,000
	7 Petugas Teknik	5	2,493,000
	**) Untuk JFU Jabatan Penunjang seperti Penelaah Keuangan, Penata Keuangan, Penelaah BMN, Penata BMN, Pengadministrasi Umum, dan lainnya dapat digunakan juga pada Jabatan Kesatkeran		

MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO